**PERANAN PENGENDALIAN INTERNAL PADA KOPERASI PURLINA KOTA SEMARANG****Rizky Widya Astari** ✉, **Ade Rustiana**

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel*Sejarah Artikel:*

Diterima Oktober 2015
Disetujui Oktober 2015
Dipublikasikan
November 2015

*Keywords:**Internal Control***Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk menelaah bagaimana peranan pengendalian internal dalam lingkungan, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, monitoring/pemantauan di Koperasi Purlina Kota Semarang. Metode pengumpulan data yaitu dengan metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. Jumlah responden sebanyak 5 orang, diambil dari pengurus Koperasi Purlina Kota Semarang. Hasil penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh gambaran mengenai peranan pengendalian internal pada Koperasi Purlina Kota Semarang. Dalam melakukan kegiatannya, Koperasi Purlina Kota Semarang telah menerapkan pengendalian internal yang meliputi: Lingkungan Pengendalian, Perkiraan Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan.

Abstract

The purpose of this study was to examine how the role of internal control in the environment, risk assessment, control activities, monitoring in Semarang City Cooperative Purlina. Methods of data collection is by interview, observation, and documentation methods. The number of respondents as many as five (5) members, drawn of the board Cooperative Purlina Semarang. Result of research conducted, the authors obtain an overview of the role of internal control Purlina Cooperative in Semarang. In conducting its activities, the Cooperative Purlina Semarang City has implemented internal controls include: Control Environment, Risk Estimates, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring.

© 2015 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung C6 Lantai 1 FE Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: rizkywidya_astari@yahoo.com

ISSN 2252-6544

PENDAHULUAN

Koperasi sebagai badan usaha senantiasa harus diarahkan dan didorong untuk ikut berperan secara nyata meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya agar mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, sehingga lebih mampu berperan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat. Perkembangan perekonomian nasional dan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dunia usaha termasuk koperasi saat ini sangat cepat dan dinamis.

Menurut Undang-undang Koperasi No.25 Tahun 1992 Pasal 1 : “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan”. Salah satu unit usaha koperasi adalah memberikan kredit simpan pinjam. Pemberian kredit merupakan suatu usaha koperasi yang paling pokok, maka koperasi perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yg mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya.

Dalam koperasi, perlu adanya pengendalian internal. Pada dasarnya, setiap pelaku bisnis ‘yang baik’ dari masa ke masa pasti memiliki kesadaran akan pentingnya “pengendalian internal” agar dapat sejalan dengan tujuan bisnis itu dan siap menghadapi peluang dan tantangan di luar institusi maupun di waktu mendatang.

Masalah keamanan atas kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh koperasi, karena adanya resiko yang timbul dalam sistem pemberian kredit. Permasalahan ini bisa dihindari dengan adanya suatu pengendalian intern yang memadai dalam bidang perkreditan. Dengan kata lain diperlukan suatu pengendalian intern yang dapat menunjang efektivitas sistem pemberian kredit. Dengan terselenggaranya pengendalian intern yang memadai dalam

bidang perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam koperasi tersebut.

Untuk mampu berperan sebagai badan usaha yang tangguh dan mandiri, koperasi melalui usaha pemberian kreditnya harus mampu meningkatkan efektivitas sistem pemberian kredit dan berusaha sebaik mungkin mengurangi risiko kegagalan kredit. Jika diteliti lebih dalam, kegagalan kredit terutama disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern.

Pengendalian merupakan fungsi manajemen yang melaksanakan analisa atas seluruh aktivitas perusahaan. Adanya pengendalian di perusahaan, maka diharapkan seluruh aktivitas dapat berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama pengendalian internal pada kredit adalah untuk mengarahkan kegiatan pemberian kredit agar dapat mengurangi terjadinya kegagalan perkreditan dan mengurangi kredit macet.

Laporan pertanggung jawaban harus dapat mencerminkan bagaimana pengurus mendesain pengelolaan usaha agar semua kekayaan koperasi aman dari semua tindakan yang dapat merugikan, penggunaannya dilakukan secara efektif dan efisien, dan semua aktivitas koperasi tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, pelaporan keuangan mencerminkan fakta yang sesungguhnya, dan bebas dari salah saji material. Pertanggung jawaban pengurus harus dapat disampaikan secara berkala kepada para pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*), antara lain terutama anggota, dan kreditur serta pemerintah yang menanamkan modal dan/atau yang memberikan peluang dan fasilitas kepada koperasi.

Koperasi Purlina Kota Semarang adalah Koperasi untuk para pensiunan PT.PLN Kota Semarang yang bergerak dalam bidang simpan pinjam. Dalam pemberian kredit, perlu adanya pengendalian internal. Di Koperasi Purlina Kota Semarang, memungkinkan sering adanya kesalahan dalam pertimbangan dalam keputusan bisnis yang diambil, gangguan dalam pengendalian yang membuat pengurus secara keliru memahami perintah atau membuat

kesalahan karena kelalaian dan kelelahan. Karena itu, diperlukan adanya suatu peranan pengendalian internal.

Committee of Sponsoring Organization (COSO) yang terdiri dari lima organisasi profesi yaitu: (1) *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA); (2) *American Accounting Association* (AAA); (3) *The Institute of Internal Auditors* (IIA); (4) *Institute of Management Accountants* (IMA); dan (5) *Financial Executives Institute* (FEI) menerbitkan laporan berjudul *Internal Control Integrated Framework*. Adanya laporan ini, maka *Auditing Standard Board* tahun 1995 merevisi SAS 55 dan menggantinya dengan SAS 78. **Laporan COSO** yang dikutip oleh **Bodnar** dan **Hopwood** (2001:182) mendefinisikan pengertian pengendalian internal sebagai berikut:

“Internal control is process-effected by an entity’s board of director, management, and other personal-designed to provide reasonable assurance regarding achievement of objectives in the following categories:

- a. *Reliability of financial reporting*
- b. *Effectiveness and efficiency of operation, and*
- c. *Compliance with applicable laws and regulations”.*

Jadi pengendalian internal adalah proses yang dapat dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, personil satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal keandalan laporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi.

Tujuan sistem pengendalian intern yang efektif dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Untuk menjamin kebenaran data akuntansi
2. Untuk mengamankan harta kekayaan dan catatan pembukuannya
3. Untuk menggalakkan efisiensi usaha
4. Untuk mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang telah digariskan (Tunggal 1995:2)

Pengendalian internal (*internal control*) menurut COSO (*Commitee of Sponsoring Organization*) terdiri atas 5 komponen, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian
Inti dari setiap perusahaan adalah faktor manusia yang meliputi integritas, nilai-nilai etika, dan kompetensi; filosofi dan gaya manajemen; cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggungjawabnya; pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
2. Penilaian Risiko
Perusahaan harus menyadari dan menghadapi risiko. Perusahaan harus menetapkan tujuannya dipadukan dengan kegiatan keuangan serta kegiatan lainnya agar dapat beroperasi secara terkoordinasi. Perusahaan juga harus membuat mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko terkait.
3. Aktivitas Pengendalian
Kebijakan pengendalian dan prosedur harus ditetapkan dan dilaksanakan. Hal ini akan memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diidentifikasi manajemen untuk menghadapi risiko, yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan, dilaksanakan secara efektif. Aktivitas pengendalian merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap asset perusahaan.
4. Informasi dan Komunikasi
Merupakan sistem informasi dan komunikasi yang memberikan informasi yang diperlukan kepada para pegawai, dalam melaksanakan, mengelola dan mengendalikan operasinya. Sistem

informasi dan komunikasi merupakan suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku.

5. Monitoring/pemantauan

Seluruh proses harus dipantau dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Dengan demikian sistem yang ada dapat secara dinamis berubah sesuai keadaan yang dihadapi. Monitoring merupakan proses penilaian terhadap kualitas sistem *internal control* termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, dengan ketentuan bahwa penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Komite Audit.

Berdasarkan pengertian pengendalian internal yang telah dikemukakan, terdapat beberapa konsep yang mendasari pengendalian internal. Menurut Mulyadi (2002:180) konsep dasar tersebut adalah:

1. Pengendalian merupakan suatu proses. Pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian internal itu sendiri bukan merupakan tujuan. Pengendalian internal merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat pervasif dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan, dari infrastruktur entitas.
2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen, dan personel lain.
3. Pengendalian internal dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan

keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian internal dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian internal tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.

4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan: pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.

Konsep pengendalian internal tersebut bermanfaat sebagai acuan bagi manajemen dalam melaksanakan pengendalian internal dalam koperasi. Manajemen dalam koperasi dalam melaksanakan kegiatan pengendalian internal bisa mempersiapkan sebaik mungkin mulai dari proses, personil, tujuan, serta apa saja yang dapat menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan pengendalian internal.

Ada beberapa asumsi dasar yang perlu dipahami mengenai pengendalian intern bagi suatu entitas organisasi atau perusahaan.

Menurut Sanyoto (2007:256):

1. Sistem pengendalian intern merupakan *management responsibility*. Bahwa sesungguhnya yang paling berkepentingan terhadap sistem pengendalian intern suatu entitas organisasi/perusahaan adalah manajemen (lebih tegasnya ialah *top management/direksi*), karena dengan sistem pengendalian intern yang baik itulah *top management* dapat mengharapkan kebijakannya dipatuhi, aktiva atau harta perusahaan dilindungi, dan penyelenggaraan pencatatan berjalan baik.
2. *Top management* bertanggungjawab menyusun sistem pengendalian intern,

tentu saja dilaksanakan oleh para stafnya. Dalam penyusunan *team* yang akan ditugaskan untuk merancang sistem pengendalian intern, harus dipilih anggotanya dari para ahli/kompeten, termasuk yang berkaitan dengan teknologi informasi (mengingat pada saat ini sistem lazimnya dididesain dengan berbasis teknologi informasi).

3. Sifat sistem pengendalian intern seharusnya bersifat *generic*, mendasar dan dapat diterapkan pada setiap perusahaan pada umumnya (tidak boleh jika hanya berlaku untuk suatu perusahaan tertentu saja, melainkan harus ada hal-hal yang bersifat dasar yang berlaku umum).
4. Sifat sistem pengendalian intern adalah *reasonable assurance*, artinya tingkat rancangan yang kita desain adalah yang paling optimal. Sistem pengendalian yang paling baik ialah bukan yang paling maksimal, apalagi harus dipertimbangkan keseimbangan *cost benefit*-nya.
5. Sistem pengendalian intern mempunyai keterbatasan-keterbatasan atau *constraints*, misalnya adalah sebaik-baiknya control tetapi kalau para pegawai yang melaksanakannya tidak cakap, atau kolusi, maka tujuan pengendalian itu mungkin tidak tercapai.
6. Sistem pengendalian intern harus selalu dan terus menerus dievaluasi, diperbaiki, disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan teknologi.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Purnakaryawan Listrik Negara (PURLINA) Semarang yang berada di Jl. Tanjung 6B Pandansari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah ketua Koperasi Purlina Kota Semarang dan pengurus Koperasi Purlina Kota Semarang. Fokus penelitian ini berisi pokok-pokok kajian yang menjadi pusat perhatian dari peneliti yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian di Koperasi Purlina Kota Semarang
2. Penilaian Risiko di Koperasi Purlina Kota Semarang
3. Aktivitas Pengendalian di Koperasi Purlin Kota Semarang
4. Informasi dan Komunikasi di Koperasi Purlina Kota Semarang
5. Pemantauan di Koperasi Purlina Kota Semarang

Sumber dan Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu, data utama dan data tambahan. Menurut Lofland (dalam Moleong, 2011: 157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan. Data utama diperoleh dari para informan, sedangkan data pendukung atau tambahan bersumber dari dokumen berupa catatan, buku, arsip dan gambar/foto. Untuk memperoleh data utama dalam penelitian ini adalah melalui subjek, yaitu ketua Koperasi Purlina Kota Semarang. Sedangkan sumber informasi pendukung dari penelitian ini menggunakan sumber data dari pihak lain yaitu pengurus Koperasi Purlina Kota Semarang.

Instrumen Penelitian

Merujuk pada fokus penelitian ini, instrumen penelitian meliputi pengkajian peranan pengendalian internal atas pemberian kredit pada Koperasi Purlina Kota Semarang. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama, sedangkan instrumen non manusia bersifat mendukung. Peneliti sendiri

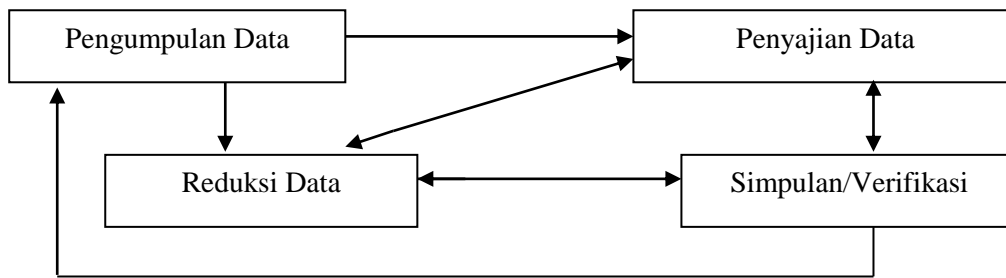
atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal itu dilakukan karena jika memanfaatkan alat bukan manusia, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu masalah yang dapat berhubungan dengan responden dan yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan (Moleong, 2011:163). Kehadiran peneliti merupakan tolak ukur keberhasilan terhadap beberapa kajian.

Analisis Data

Bogdan dan Bikleu dalam Suharsimi Arikunto (1992: 145) menyebutkan bahwa yang

dimaksud dengan analisis data adalah suatu proses mengurutkan dan mengamati secara sistematis transkrip wawancara (*interview*), catatan lapangan (*hasil observasi*), dan bahan-bahan lain yang ditemukan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diamati dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.

Dalam penelitian kualitatif seperti yang dianjurkan oleh Miles dan Huberman (2002: 16) analisis data meliputi tiga langkah pokok yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Ketiga langkah ini dilakukan secara terus menerus sejak awal. Data yang diperoleh dari lapangan segera dituangkan dalam bentuk tulisan dan analisis.



Gambar 1. Komponen-Komponen Analisis Data, Metode Interaktif (Miles dan Huberman, 2002: 20).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Koperasi Purlina Kota Semarang

Koperasi Purnakaryawan Listrik Negara disingkat Koperasi “Purlina” didirikan pada tanggal 27 Maret 1989 yang pada saat itu dibidani para pensiunan PT.PLN (Persero). Para pensiunan saat itu tergabung dalam persatuan Pensiunan Departemen Pertambangan dan Energi (PPDPE) Cabang PLN Distribusi Jawa Tengah & DIY. Untuk saat ini organisasi tersebut berubah menjadi Ikatan Keluarga Pensiunan Listrik Negara (IKPLN) Daerah Jawa Tengah & D.I Yogyakarta.

Tujuan Koperasi Purlina yaitu kegiatan menampung material Instalasi Paket Listrik, mengadakan simpan pinjam dan memberika kesejahteraan untuk anggotanya. Koperasi Purlina sudah mempunyai Badan Hukum, No:

11119A/BH/PAD/KWL II/XII/06. Dan sebagai wajib pajak: NPWP, No: 01.478.095.1.509.009. Keanggotaan Koperasi Purlina adalah pensiunan PT.PLN (Persero) yang berdomisili di kota Semarang dan menerima manfaat pension melalui kantor Distribusi dan APJ Semarang. Visi Koperasi Purlina Kota Semarang yaitu “Menjalin suasana kekeluargaan antar penerima manfaat pensiun serta meningkatkan kesejahteraan anggota secara lahir maupun bathin. Sedangkan Misi Koperasi Purlina Kota Semarang yaitu:

1. Memiliki kebiasaan untuk menabung
2. Membantu anggota yang membutuhkan dana
3. Memiliki kepedulian sosial

Peranan Pengendalian Internal Dalam Lingkungan di Koperasi Purlina Kota Semarang

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian internal di Koperasi Purlina Kota Semarang sudah di bilang baik, dilihat dari kebijakan tertulis mengenai kejujuran dan kedisiplinan bagi seluruh karyawan. Sesuai pernyataan Bapak Mardarjanto sebagai berikut:

“Ya, Koperasi Purlina Kota Semarang sebenarnya sudah menerapkan kedisiplinan dan kejujuran walaupun belum secara tertulis. Kami beranggapan bahwa kedisiplinan dan kejujuran merupakan nilai dasar suksesnya suatu koperasi, sehingga koperasi akan mendapatkan kepercayaan dari anggotanya”.

Hal ini dapat dibuktikan dari hasil observasi di Koperasi Purlina Kota Semarang, bahwa karyawan Koperasi Purlina Kota Semarang telah menerapkan kedisiplinan, termasuk kedisiplinan waktu. Pengaturan jam kerja pada Koperasi Purlina Kota Semarang telah ditentukan yaitu dari jam 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB dan diberikan waktu istirahat selama 1 (satu) jam mulai dari jam 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.

Adapun juga hasil wawancara kepada Bapak Purwanto. Menurut Bapak Purwanto, Koperasi Purlina Kota Semarang sudah menerapkan kedisiplinan untuk karyawannya. Seperti pernyataan sebagai berikut:

“Ya, koperasi Purlina sudah menerapkan kedisiplinan untuk karyawannya. Kedisiplinan kerja merupakan pembaruan pandangan hidup dan kulturasi dengan sikap mental memuliakan kerja serta perluasan upaya untuk meningkatkan kedisiplinan kerja karyawan adalah sikap mental”.

Menurut pembina, kedisiplinan pada semua perusahaan/koperasi ditentukan bagaimana sistem manajemennya. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Supriyanto sebagai berikut:

“Ya, Koperasi Purlina Kota Semarang sudah menetapkan kebijakan tertulis mengenai

kejujuran dan kedisiplinan. Kedisiplinan pada semua perusahaan/koperasi ditentukan bagaimana sistem manajemennya, karena sumber daya manusia memegang peranan utama dalam proses peningkatan kedisiplinannya”.

Hal ini dapat dibuktikan dari hasil observasi di Koperasi Purlina Kota Semarang yaitu tentang manajemen yang ada di Koperasi Purlina Kota Semarang. Manajemen Koperasi Purlina Kota Semarang meliputi 4 (empat) unsur yaitu: anggota, pengurus, manajer, dan karyawan. Sistem manajemen di Koperasi Purlina Kota Semarang sudah mengarah kepada manajemen partisipatif yang di dalamnya terdapat kebersamaan, dan keterbukaan, sehingga seluruh pengurus Koperasi Purlina Kota Semarang sudah menetapkan kedisiplinan dan kejujuran.

Karyawan di Koperasi Purlina Kota Semarang dituntut untuk bersifat etis. Maksud dan tujuan perilaku etis ini tidak hanya untuk memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi semua peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang terkait, namun memberikan panduan bagi perusahaan atau karyawan dalam melakukan interaksi berdasarkan nilai-nilai moral yang merupakan bagian dari budaya perusahaan. Seperti pernyataan berikut:

“Ya, karyawan sudah dituntut untuk bersifat etis. Maksud dan tujuan perilaku etis ini tidak hanya untuk memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi semua peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang terkait, namun memberikan panduan bagi perusahaan atau karyawan dalam melakukan interaksi berdasarkan nilai-nilai moral yang merupakan bagian dari budaya perusahaan”.

Tak hanya itu, setiap personil Koperasi Purlina Kota Semarang baik pimpinan maupun pegawai mampu memahami nilai-nilai integritas dan etika dalam hal keesungguhan bekerja pada setiap wewenangnya masing-masing. Sesuai dengan pernyataan Bapak Mardarjanto sebagai berikut:

“Kami sudah mengarahkan segenap pengurus dan karyawan untuk selalu bersikap santun/etis dalam melayani anggotanya,

mengingat anggota Koperasi Purlina Kota Semarang adalah pensiunan PT.PLN (Persero) dan usianya sudah tua-tua”.

Semua karyawan di Koperasi Purlina Kota Semarang diusahakan agar bersifat etis. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Supriyanto berikut:

“Ya, kami sudah mengusahakan agar karyawan bersifat etis. Pada hakekatnya perilaku etis berisi tentang keharusan yang wajib dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari sebagai penjabaran pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas (pertanggung jawaban), Independensi (kemandirian), dan Faimess (kewajaran)”.

Begitu pula dengan pernyataan Bapak Willem Petta sebagai berikut:

“Ya, kami sudah menuntut untuk melakukan itu. Karena etika kerja merupakan rumusan penerapan nilai-nilai etika yang berlangsung di lingkungannya dengan tujuan untuk mengatur tata karma aktivitas para karyawan agar mencapai tingkat efisiensi dan produktivitas yang maksimal”.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil observasi di Koperasi Purlina Kota Semarang, bahwa karyawan mampu memahami nilai-nilai integritas yaitu dengan bertindak konsisten sesuai dengan nilai nilai kebijakan organisasi serta kode etik profesi.

Adapun hasil wawancara dari Bapak Suyamto tentang kedisiplinan di Koperasi Purlina Kota Semarang sebagai berikut:

“Ya, koperasi Purlina sudah menetapkan itu. Namun disiplin saja tanpa disertai oleh sikap inisiatif para peserta organisasi perusahaan, menyebabkan organisasi kekurangan energy dalam mencapai tujuan”.

Dan kami sudah menerapkan keduanya, kedisiplinan disertai sikap inisiatif.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil observasi di Koperasi Purlina Kota Semarang, bahwa karyawan Koperasi Purlina Kota Semarang selalu menerapkan sikap inisiatif kepada seluruh pengurus dan anggotanya. Seperti ketika Ketua Koperasi Purlina Kota Semarang melakukan diskusi mengenai RAT, namun laptop Ketua Koperasi Purlina Kota Semarang tiba-tiba rusak. Dan dengan sikap inisiatifnya, Ketua Koperasi segera menuliskan materi yang akan dipresentasikan dengan menggunakan white-board dan menguraikan materi secara jelas dan runtut.

Dewan direksi atau komite audit yang terdapat pada Koperasi Purlina Kota Semarang yaitu badan pengawas. Hal ini menunjukkan bahwa dewan direksi ikut berperan dalam proses pengendalian internal. Sesuai dengan pernyataan Bapak Mardarjanto sebagai berikut:

“Ya ada. Yang menangani internal audit adalah Badan Pengawas Koperasi Purlina Kota Semarang”.

Hal ini dapat dibuktikan dari hasil observasi di Koperasi Purlina Kota Semarang, bahwa yang menangani pengendalian internal adalah Badan Pengawas. Hal-hal yang diperiksa Badan Pengawas Koperasi Purlina Kota Semarang meliputi:

1. Memeriksa keandalan laporan keuangan
2. Melihat proses jalannya kegiatan akuntansi
3. Mananyakan kepada pengurus Koperasi Purlina Kota Semarang tentang kesulitan apa saja dalam membuat laporan keuangan.

Tabel 1. Hasil Temuan Observasi

Variabel yang Diamati	Deskripsi
Pengawas Koperasi Purlina Kota Semarang	Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Badan Pengawas Koperasi Purlina Kota Semarang banyak yang belum berfungsi. Hal ini disebabkan oleh Kemampuan anggota pengawas yang belum memadai, Pembukuan Koperasi Purlina Kota Semarang belum lengkap Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas koperasi skunder dan kantor koperasi juga belum banyak membantu perkembangan kemampuan anggota pengawas ataupun peningkatan pembukuan Koperasi Purlina Kota Semarang

Peranan Pengendalian Internal Dalam Penilaian Risiko di Koperasi Purlina Kota Semarang

Penilaian risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi umum di Indonesia. Keputusan akuntansi dapat dipakai untuk pengambilan keputusan para pimpinan koperasi. Untuk itu dalam proses serta pelaporannya, akuntansi yang diterapkan pada Koperasi Purlina Kota Semarang selalu konsisten terhadap prinsip dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu laporan keuangan yang dipakai sebagai pembandingan dari tahun ke tahun dapat dipercaya.

Penaksiran resiko atas pemberian kredit di Koperasi Purlina; pengidentifikasian, analisis, dan penyusunan laporan keuangan disajikan

dengan prinsip akuntansi. Seperti pernyataan Bapak Supriyanto berikut:

“Penaksiran resiko atas pemberian kredit di Koperasi Purlin meliputi; pengidentifikasian, analisis, dan penyusunan laporan keuangan disajikan dengan prinsip akuntansi”.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil observasi di Koperasi Purlina Kota Semarang mengenai kehandalan laporan keuangan pada Koperasi Purlina Kota Semarang. Dari dokumentasi RAT, dilihat dari laporan keuangannya, dapat dengan mudah dipahami. Dilihat dari pemasukan dan pengeluaran biaya, laporan laba rugi di Koperasi Purlina Kota Semarang. Informasi dalam RAT Koperasi Purlina Kota Semarang juga disajikan dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh para pensiunan PT. PLN Kota Semarang. Seperti tabel berikut:

Tabel 2. Permodalan Koperasi Purlina Kota Semarang

No	Modal	Per 31 Desember 2013 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
1.	Simpanan Pokok	12.900.000	12.350.000
2.	Simpanan Wajib	245.310.000	288.058.000
3.	Dana Cadangan	75.339.125	79.649.125
4.	Dana Sosial	1.951.192	4.014.535
5.	Dana Pendidikan	3.253.000	4.021.000
6.	Dana Pembangunan	1.138.000	1.570.000
7.	Dana Pertanggungungan	56.552.100	76.815.300
Jumlah		396.443.417	466.477.960

Sumber: RAT Koperasi Purlina Kota Semarang

Setiap tahun buku per 31 Desember, laporan permodalan Koperasi Purlina Kota Semarang selalu melakukan penilaian risiko terhadap naik turunnya SHU. Dan Koperasi Purlina Kota Semarang selalu mempertahankan agar SHU tetap naik setiap tahunnya.

Peranan Pengendalian Internal Dalam Aktivitas Pengendalian di Koperasi Purlina Kota Semarang

Dokumen dan catatan atas transaksi kredit diyakini keabsahannya sehingga koperasi

secara yuridis berada pada posisi yang kuat. Sesuai dengan pernyataan Bapak Mardarjanto berikut:

“Kewajiban dokumen-dokumen, pemisahan tugas yang cukup, catatan, informasi nasabah, itu sangat diperlukan untuk pemberian kredit”.

Dari hasil observasi di Koperasi Purlina Kota Semarang, dapat dilihat jumlah nasabah yang masuk dan keluar sebagai anggota, dalam tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Anggota Masuk dan Anggota Keluar Koperasi Purlina Kota Semarang Tahun 2012-2014

Tahun	Jumlah Anggota pada Awal Tahun	Jumlah Anggota Masuk	Jumlah Anggota Keluar/Pindah Bank
2012	516 orang	8 orang	30 orang
2013	494 orang	4 orang	36 orang
2014	462 orang	18 orang	49 orang

Sumber: RAT Koperasi Purlina Kota Semarang

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil observasi di Koperasi Purlina Kota Semarang mengenai pemisahan tugas yang cukup di Koperasi Purlina Kota Semarang.

Pemisahan tugas yang cukup yaitu terkait dengan analisis permohonan kredit oleh nasabah Koperasi Purlina Kota Semarang.

Tugas :

1. *Survey* kepada calon nasabah atau debitur
2. Melakukan analisis permohonan kredit calon nasabah

3. Mengajukan rekomendasi permohonan kredit calon nasabah

4. Melakukan pengerahan dana dan pembinaan nasabah

Wewenang :

1. Mengajukan rekomendasi permohonan kredit calon nasabah
2. Melakukan pembinaan kepada nasabah, jika penagihan mengalami masalah
3. Menerima titipan angsuran dan dana-dana lainnya

Pengecekan independen untuk menguji kesesuaian jumlah kredit dengan data penerimaan kas yang diterima pada Koperasi Purlina Kota Semarang adalah dengan mencocokkan Buku Pinjaman Anggota dengan bukti kas dan catatan ekstra komtabel bendahara koperasi.

Aktivitas pengendalian yaitu mencakup apa saja aktivitas usaha Koperasi Purlina Kota Semarang. Aktivitas usaha Koperasi Purlina Kota Semarang meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan pinjaman. Seperti pernyataan Bapak Supriyanto berikut:

“Aktivitas usaha di Koperasi Purlina Kota Semarang meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan pinjaman.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil observasi di Koperasi Purlina Kota Semarang tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi Purlina Kota Semarang sebagai berikut:

1. Simpanan:

Simpanan Pokok : Untuk meningkatkan jumlah anggota yang tujuannya menggali dan meningkatkan jumlah modal sendiri yang sasarannya kepada calon anggota yang memenuhi syarat. Anggota Koperasi Purlina berkewajiban membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,- saat mendaftar menjadi anggota, dan dibayar secara tunai.

Simpanan Wajib: Dengan cara mendidik anggota suka menabung yang tujuannya untuk meningkatkan modal koperasi. Anggota Koperasi Purlina wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,-

Simpanan Sukarela: Yaitu bersifat uang titipan yang setiap saat dapat diminta kembali. Simpanan sukarela di Koperasi Purlina paling sedikit sebesar Rp. 5000,-

2. Pinjaman, yaitu kredit jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang berjangka waktu paling lama 4 tahun, dan jangka pendek berjangka waktu maksimal 6 bulan.

Peranan Pengendalian Internal Dalam Informasi dan Komunikasi di Koperasi Purlina Kota Semarang

Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun diluar organisasi. Komunikasi ini mencakup sistem pelaporan penyimpangan kepada pihak yang lebih tinggi dalam entitas. Pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan, daftar akun, dan memo juga merupakan bagian dari komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian intern.

Koperasi Purlina Kota Semarang telah mampu untuk melaksanakan mekanisme sistem informasi akuntansi yang dijalankan untuk mencegah salah saji dalam laporan keuangan serta memberikan keyakinan yang memadai, bahwa transaksi yang dicatat adalah sah, transaksi telah diotorisasi, dan transaksi kredit telah dicatat.

Dalam pembuatan laporan keuangan pada Koperasi Purlina Kota Semarang, selalu dikomunikasikan dengan baik. Sesuai pernyataan Bapak Supriyanto sebagai berikut:

“Selalu dikomunikasikan antara fungsi keuangan, fungsi akuntansi dan sekretariat serta bendahara koperasi. Dan yang mengerjakan laporan keuangan ialah seluruh pengurus koperasi Purlina Kota Semarang”.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil observasi di Koperasi Purlina Kota Semarang mengenai informasi dan komunikasi yang selalu dikomunikasikan dengan baik oleh setiap karyawannya. Ketua Koperasi Purlina Kota Semarang selalu mengkomunikasikan informasi secara lisan dan tertulis. Informasi tersebut meliputi aturan, prosedur, kebijakan, sanksi, *job description*, wewenang, dan tanggung jawab. Komunikasi secara lisan dilakukan melalui *briefing*, sedangkan komunikasi secara tertulis disampaikan melalui web internet dan buku pedoman manual.

Peranan Pengendalian Internal Dalam Monitoring/Pemantauan di Koperasi Purlina Kota Semarang

Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian internal dapat dimonitor secara efektif melalui penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen. Usaha pemantauan yang terakhir dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku karyawan atau tanda-tanda peringatan yang diberikan oleh sistem akuntansi.

Pemantauan pada Koperasi Purlina Kota Semarang dilakukan oleh Badan Pengawas dengan melihat pada laporan penyimpangan secara periodik berjalan dengan baik.

Manajemen Koperasi Purlina Kota Semarang melakukan aktivitas pemantauan untuk menilai efektivitas rancangan dan operasi pengendalian internal pemberian kredit adalah dengan anggota yang mengajukan kredit wajib mengisi Formulir Pengajuan Pinjaman. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Supriyanto sebagai berikut:

“Anggota yang mengajukan kredit wajib mengisi Formulir Pengajuan Pinjaman, guna untuk aktivitas pemantauan menilai efektivitas rancangan dan operasi pengendalian internal pemberian kredit”.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil observasi di Koperasi Purlina Kota Semarang. Koperasi Purlina Kota Semarang selalu melakukan observasi secara terpisah yang dilakukan oleh atasan setiap harinya, khususnya mengenai pemberian kredit. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dari setiap marketing yang ada. Selain itu, terdapat Komite Audit atau Badan Pengawas yang melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian internal, identifikasi hal yang perlu diperhatikan Badan Pengawas, dan penelaahan tingkat kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan.

Pembahasan

Peranan Pengendalian Internal Dalam Lingkungan di Koperasi Purlina Kota Semarang

1. Integritas dan Nilai Etika

Setiap personil pada Koperasi Purlina Kota Semarang baik pimpinan maupun pegawai mampu memahami nilai-nilai integritas dan etika dalam hal kesungguhan bekerja pada setiap wewenangnya masing-masing. Pihak manajemen telah berhasil menterjemahkan budaya kerja yang hendak diterapkan ke dalam rencana kegiatan dan anggaran koperasi ke dalam masing-masing pegawai tentang pentingnya rasa dan sikap ulet serta tangguh dalam bekerja. Pembahasan mengenai lingkungan pengendalian internal dari segi integritas dan nilai etika dari 5 subjek penelitian yang telah diwawancari dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dalam lingkungan pengendalian, Koperasi Purlina Kota Semarang mempunyai komitmen bahwa pengendalian internal merupakan hal penting dalam sistem pemberian kredit, karena Koperasi Purlina Kota Semarang beranggapan bahwa kedisiplinan dan kejujuran merupakan nilai dasar suksesnya suatu koperasi dan akan mendapatkan kepercayaan dari anggotanya. Pada hakekatnya perilaku etis berisi tentang keharusan yang wajib dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari sebagai penjabaran pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas (pertanggung jawaban), Independensi (kemandirian), dan Faimess (kewajaran). Maksud dan tujuan perilaku etis ini tidak hanya untuk memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi semua peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang terkait, namun memberikan panduan bagi perusahaan

atau karyawan dalam melakukan interaksi berdasarkan nilai-nilai moral yang merupakan bagian dari budaya perusahaan.

2. Dewan Direksi atau Komite Audit di Koperasi Purlina Kota Semarang

Dewan direksi atau Komite Audit yang terdapat pada Koperasi Purlina Kota Semarang yaitu Badan Pengawas. Tetapi tidak secara khusus menangani masalah kredit melainkan kegiatan operasional secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Direksi ikut berperan dalam proses pengendalian internal.

3. Pembagian Wewenang dan Tanggung Jawab

Koperasi telah menerapkan kebijakan dan prosedur dalam merekrut karyawan sehingga di dapat karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya untuk mendukung sistem pengendalian internal yang efektif. Pembahasan mengenai lingkungan pengendalian internal dari segi pembagian wewenang dan tanggung jawab dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengaturan jam kerja pada Koperasi Purlina Kota Semarang telah ditentukan yaitu dari jam 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB dan diberikan waktu istirahat selama 1 (satu) jam mulai dari jam 12.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB.

Peranan Pengendalian Internal Dalam Penilaian Risiko di Koperasi Purlina Kota Semarang

Penilaian risiko pada Koperasi Purlina Kota Semarang yaitu dengan identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Penilaian risiko terhadap pemberian kredit di Koperasi Purlina Kota Semarang ada 3

kategori, yaitu: kredit lancar, kredit tidak lancar, dan kredit macet.

Peranan Pengendalian Internal Dalam Aktivitas Pengendalian di Koperasi Purlina Kota Semarang

Dokumentasi dan catatan di Koperasi Purlina Kota Semarang atas transaksi kredit diyakini keabsahannya. Hal ini dilandasi atas pemeriksaan secara berkala terhadap seluruh dokumen yang terkait dalam penyaluran kredit yang merupakan bukti perjanjian hukum antara koperasi dengan nasabah dan bukti perjanjian hukum antara koperasi dengan nasabah dan bukti kepemilikan barang jaminan serta dokumen perkreditan lainnya yang merupakan perbuatan hukum dan dapat mempunyai akibat hukum. Pengecekan independen untuk menguji kesesuaian jumlah pemberian kredit dengan data penerimaan kas yang diterima yaitu dengan mencocokkan buku pinjaman anggota dengan bukti kas dan catatan ekstra komtabel bendahara koperasi.

Peranan Pengendalian Internal Dalam Informasi dan Komunikasi di Koperasi Purlina Kota Semarang

Koperasi Purlina Kota Semarang telah mampu untuk melaksanakan mekanisme sistem informasi akuntansi yang dijalankan untuk mencegah salah saji dalam laporan keuangan serta memberikan keyakinan yang memadai, bahwa:

1. Transaksi yang dicatat adalah sah : Semua transaksi kredit telah diyakini kesahannya agar tidak terjadi tuntutan secara hukum di kemudian hari.
2. Transaksi telah diotorisasi : Transaksi kredit telah diotorisasi sehingga hanya bagian-bagian tertentu saja yang berwenang melakukan transaksi kredit.
3. Transaksi kredit telah dicatat : Semua transaksi kredit telah dicatat dengan baik, sehingga dapat ditelusuri kronologisnya. Selain itu telah diterapkan sistem penomoran rekening untuk menghindari penyimpangan.

Peranan Pengendalian Internal Dalam Monitoring/Pemantauan di Koperasi Purlina Kota Semarang

Pemantauan di Koperasi Purlina Kota Semarang dilakukan oleh Badan Pengawas dengan melihat pada laporan penyimpangan secara periodik dirasakan berjalan dengan baik. Begitu pula dengan pengawasan rutin yang dilakukan oleh kantor pusat dianggap sudah cukup baik untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyelewengan. Dengan pemantauan yang memadai, diharapkan semua karyawan dapat bersikap jujur dan terbuka terutama dalam hal pelaporan penyimpangan guna meminimalkan penyelewengan.

SIMPULAN

1. Lingkungan Pengendalian Koperasi Purlina Kota Semarang

Diterapkannya kebijakan tertulis mengenai kejujuran dan kedisiplinan bagi karyawan. Adanya struktur organisasi yang memadai dan telah dilengkapi dengan uraian tugas, penetapan tanggungjawab dan pelimpahan wewenang yang jelas sehingga setiap karyawan dapat mengetahui tugasnya masing-masing.

2. Penilaian Risiko Koperasi Purlina Kota Semarang

Adanya perkiraan risiko sehingga dapat mengikuti setiap perkembangan bila terjadi perubahan.

3. Aktivitas Pengendalian Koperasi Purlina Kota Semarang

Adanya otorisasi dari pejabat yang berwenang terhadap transaksi pemberian kredit. Adanya penggunaan dokumen dan catatan yang memadai.

4. Informasi dan Komunikasi Koperasi Purlina Kota Semarang

Adanya pelaksanaan sistem informasi dan komunikasi yang didukung oleh prosedur-prosedur dan dokumen yang memadai.

5. Monitoring/pemantauan Koperasi Purlina Kota Semarang

Adanya pemantauan yang dilakukan oleh Koperasi Purlina Kota Semarang untuk menetapkan kualitas pengendalian internal dan melakukan tindak lanjut terhadap penyimpangan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji. 2002. *Koperasi, Kewirausahaan Dan Usaha Kecil*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifin Sitio, Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi Teori dan Praktek*. Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Jakarta: Erlangga.
- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Boynton, Raymond N. Johnson and Walter G. Kell. 2001. *Modern Auditing*. 7th edition. New York: John Willey and Sons, Inc.
- Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO). 1994. *Internal Control-Integrated Framework*. AICPA Publication.
- Gondodiyoto, Sanyoto. 2007. *Audit Sistem Informasi + Pendekatan CobIT*. Edisi Revisi. Jakarta: BPFE.
- Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2004. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*. Jakarta.
- Miles, Matthew B dan Huberman, A Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Valery G. Kumaat. 2011. *Internal Audit*. Jakarta: Erlangga.